

**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM IMPLEMENTASI SYARI'AT
ISLAM SECARA *KAFFAH***
**(Studi Kasus di Kota Lhokseumawe Nanggroe Aceh
Darussalam)**

Oleh
S U A D I
NPM: L2G02163

TESIS
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Sains
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Bidang Kajian Utama Sosiologi-Antropologi



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2005**

**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
SYARI'AT ISLAM SECARA *KAFFAH*
(Studi Kasus di Kota Lhokseumawe Nanggroe Aceh
Darussalam)**

Oleh
S U A D I
NPM: L2G02163

TESIS

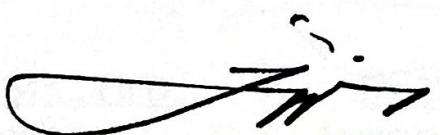
**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Sains**

**Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Bidang Kajian Utama Sosiologi-Antropologi
Telah disetujui oleh dosen pembimbing
pada tanggal seperti tertera di bawah ini**

Bandung,.....2005



**Prof. Oekan S. Abdullah, M.A., Ph.D.
Ketua Komisi Pembimbing**



**DR. Yugo Sariyun, M.A.
Anggota Komisi Pembimbing**

ABSTRAK

Legalisasi implementasi Syari'at Islam yang diberikan Pemerintah Pusat Indonesia kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik vertikal. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan peluang kepada para ulama yang terhimpun dalam sebuah lembaga, yaitu; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk berperan dalam membangun daerah menjadi islami, dengan cara mengimplementasikan Syari'at Islam secara *kaffah*. Posisi ulama dan pemerintah sejajar, tetapi wewenang dan fungsi mereka berbeda. Namun dalam upaya mengimplementasikan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe, telah terjadi konflik kepentingan antara MPU dan Pemerintah, sehingga implementasi Syari'at Islam terhambat.

Tesis ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti merupakan instrumen penelitian, yang difokuskan pada konflik kepentingan antara MPU dan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam implementasi Syari'at Islam bidang kemasyarakatan, yang meliputi perihal tata cara berbusana dan berperilaku. Data peneltian diperoleh lewat observasi, wawancara mendalam dan dokumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenapa terjadi konflik antara MPU dan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam implementasi Syari'at Islam, khususnya bidang kemasyarakatan. Selanjutnya juga untuk mengetahui bagaimana dampak konflik tersebut terhadap perubahan struktur Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara MPU dan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terjadi disebabkan oleh perbedaan posisi dan wewenang yang mereka miliki. Dampak konflik tersebut adalah telah menyebabkan perubahan struktur Pemerintah Kota Lhokseumawe,yaitu telah diakomodir usul-usul dan kepentingan-kepentingan MPU dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Selain itu, konflik juga telah membangkitkan semangat para ulama untuk berpolitik.

Akhirnya, berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada semua pembaca agar tidak menganggap konflik selalu destruktif. Bahkan kadang-kadang konflik perlu diciptakan guna memprakarsai perubahan. Kepada MPU dan Pemerintah Kota Lhokseumawe, agar konflik yang terjadi dapat lebih dieliminir lagi jika sifatnya destruktif dan diambil hikmahnya. Utamakan kemaslahatan ummat di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Peneliti selanjutnya sebaiknya melihat secara pskologisnya selain secara sosiologis.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1. Maksud Penelitian	9
1.3.2. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	11
2.1. Kajian Pustaka.....	11
2.1.1. Pengertian Konflik.....	11
2.1.2. Macam Konflik.....	13
2.1.2.1. Konflik Menurut Hubungannya dengan Organisasi.....	13
2.1.2.2. Konflik Menurut Hubungannya dengan Posisi Pelaku yang Berkonflik.....	15
2.1.2.3. Konflik Menurut Hubungannya dengan	

Sifat dari Pelaku yang Berkonflik.....	16
2.1.2.4. Konflik Menurut Hubungannya dengan Waktu.....	16
2.1.2.5. Konflik Menurut Hubungannya dengan Pengendalian.....	17
2.1.2.6. Konflik Menurut Hubungannya dengan Konsentrasi Aktivitas Manusia di dalam Masyarakat.....	18
2.1.2.7. Konflik Menurut Hubungannya dengan Tujuan Konflik.....	19
2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	19
2.1.4. Skala Intensitas dan Kekerasan Konflik.....	24
2.1.5. Perspektif Teori Konflik.....	25
2.2. Kerangka Pemikiran	37
2.3. Hipotesis Kerja.....	48
 BAB III SUBJEK/OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Subjek/Objek Penelitian (Tempat dan Waktu).....	49
3.2. Metode Penelitian Yang Digunakan.....	50
3.3. Sumber Data Penelitian	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data	52
3.5. Teknik Analisis Data	54
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	56
3.7. Jadwal Penelitian	57
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe.....	58
4.1.1. Sejarah Singkat Lahirnya Kota Lhokseumawe.....	58
4.1.2. Geografis Kota Lhokseumawe.....	59
4.1.3. Demografis Kota Lhokseumawe.....	60

4.2. Status dan Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.....	62
4.3. Hubungan Kewenangan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.....	66
4.4. Konflik Kepentingan Antara Majelis Permusyawaratan Ulama dan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.....	70
4.5. Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Perubahan Struktur Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	105